

**MANAJEMEN TATA KELOLA PARKIR BERBASIS APLIKASI SISTEM
MANAJEMEN PARKIR BANYUMAS (SIMPAS) DI KOTA PURWOKERTO**

Dewi Fitriani¹, Ariesta Amanda², Chamid Sutikno³, Indah Ayu Permana Pribadi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email Korespondensi: dewifitriani.work@gmail.com

Email: ariestaamanda92@gmail.com; sutiknochamid@gmail.com; indahayupermanap@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze parking governance management through the Banyumas Parking Management System (SIMPAS) application in Purwokerto City. The study is motivated by problems in conventional parking management, including revenue leakage, weak supervision, inconsistent parking fees, and limited transparency. A qualitative method with a descriptive approach was employed, involving thirteen informants consisting of the Head of the Parking Division of the Banyumas Transportation Agency, SIMPAS operators, parking coordinators, parking attendants, and service users, selected through purposive and random sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using George R. Terry's management theory comprising Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC). The findings indicate that SIMPAS is a digital innovation that supports more transparent and accountable parking management while contributing to increased parking retribution revenue. However, implementation has not been fully optimized due to incomplete features, limited public outreach, the absence of a clear management structure, and insufficient monitoring and control mechanisms. The study concludes that SIMPAS has significant potential to improve parking governance in Banyumas Regency, but requires stronger institutional support, technological development, human resource capacity building, and more effective outreach strategies to ensure sustainable implementation.

Keywords: Parking governance, SIMPAS, Public management, Public service digitalization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen tata kelola parkir berbasis aplikasi Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS) di Kota Purwokerto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan parkir konvensional, seperti kebocoran retribusi, lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian tarif, serta rendahnya transparansi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan tiga belas informan yang terdiri atas Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, operator SIMPAS, koordinator parkir, juru parkir, dan masyarakat pengguna layanan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPAS merupakan inovasi digital yang mendukung pengelolaan parkir lebih transparan dan akuntabel serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat fitur yang belum terealisasi, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir, belum adanya struktur pengelola yang jelas, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan pengendalian sistem. Penelitian menyimpulkan bahwa SIMPAS memiliki potensi besar dalam meningkatkan tata kelola parkir di Kabupaten Banyumas, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk mendukung implementasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kelola parkir, SIMPAS, Manajemen publik, Digitalisasi pelayanan publik, Retribusi parkir.

PENDAHULUAN

Kebijakan perpajakan merupakan komponen penting dalam tata kelola ruang publik, mobilitas masyarakat, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kerangka regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang akuntabel (Saputra & Safitri, 2020). Retribusi parkir, sebagai bagian dari retribusi jasa umum, diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Nurachman, 2023; Siahaan, 2011), dan memiliki fungsi ganda sebagai instrumen pengaturan (*regulerend*) sekaligus sumber pendapatan asli daerah (*budgetair*) (Basri & Ashwad, 2021; Lubis et al., 2024).

Namun demikian, implementasi retribusi parkir di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, pungutan liar, lemahnya pengawasan, serta pencatatan manual yang rentan manipulasi dan kebocoran pendapatan (Romasi & Ridwan, 2023). Transformasi menuju sistem pengelolaan parkir yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi digital menjadi solusi yang relevan, karena seluruh proses retribusi dapat tercatat otomatis, data terintegrasi dalam satu basis data terpusat, dan pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* (Ekaryn et al., 2022). Perkembangan ilmu administrasi publik yang bergeser dari *Old Public Administration* menuju *New Public Management* dan *New Public Service* turut mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi (Alamsyah, 2016), sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nau Angi & Irfiani, 2024).

Digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Rahmawati et al., 2023), serta mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data (Lianzah, 2017; Yulanda & Adnan, 2023). Dalam konteks ini, pengelolaan transportasi dan perpajakan menjadi elemen kunci pengembangan *smart city*, karena sistem parkir yang tidak tertata menimbulkan kemacetan, ketidakaturan ruang publik, dan kebocoran retribusi (Alzena et al., 2023; Sartika et al., 2020). Di Kota Purwokerto, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan turut memperbesar tekanan terhadap tata kelola perpajakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan mengembangkan Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS) bekerja sama dengan PT Krisna Ardhi Tama sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi pengelolaan parkir.

Keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan proses kerja secara efektif (Rahmawati et al., 2023). Penelitian ini menggunakan kerangka manajemen George R. Terry, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC), yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan SIMPAS mulai dari perencanaan teknis hingga pelaksanaan dan pengendalian di lapangan (Sartika et al., 2020). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan aplikasi SIMPAS di Kota Purwokerto, serta interaksi dan koordinasi antarpihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sistem digital di tingkat pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis secara sistematis dan faktual manajemen tata kelola parkir berbasis aplikasi SIMPAS di Kota Purwokerto. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan perpajakan di wilayah tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan dan telaah dokumen pendukung. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *random sampling* terhadap tiga belas informan yang dianggap

memiliki karakteristik, kriteria, serta pengalaman relevan, yaitu Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Operator Aplikasi SIMPAS, Koordinator Parkir, lima orang Juru Parkir, serta lima orang perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPAS dalam tata kelola parkir di Kota Purwokerto telah berjalan pada seluruh fungsi manajemen POAC, namun efektivitasnya masih bervariasi pada setiap aspek. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian telah terlaksana cukup baik melalui penetapan tujuan, strategi pengembangan, serta pembagian tugas antaraktor. Sebaliknya, fungsi pelaksanaan dan pengendalian masih menghadapi kendala, terutama terkait sosialisasi, pemanfaatan sistem oleh pengguna, serta mekanisme evaluasi yang belum optimal.

Kota Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan perparkiran seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan (Lianzah, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas telah mencapai lebih dari 738.000 unit sepeda motor dan 65.000 unit mobil penumpang, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang parkir, terutama di kawasan strategis seperti alun-alun, kawasan perdagangan, dan pusat pendidikan, sehingga sering menimbulkan kemacetan dan parkir liar (Nugraha et al., 2025). Permasalahan utama yang ditemukan meliputi ketidakjelasan tarif resmi, juru parkir tidak resmi, lemahnya pengawasan, serta pencatatan manual yang rentan manipulasi dan kebocoran PAD. Tarif resmi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 adalah Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat, namun di lapangan masih sering ditemukan pemungutan dengan nominal berbeda tanpa bukti retribusi yang sah. Kondisi inilah yang mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, melalui kerja sama dengan PT Krisna Ardhi Tama, mengembangkan SIMPAS sebagai platform manajemen parkir berbasis web yang menghubungkan data wilayah, petugas parkir, transaksi keuangan, dan layanan publik dalam satu ekosistem digital sejak pertengahan tahun 2024, yang dapat diakses publik melalui simpas.banyumaskab.go.id.

Berdasarkan observasi lapangan dan dokumen *Product Knowledge* SIMPAS yang diterbitkan PT Krisna Ardhi Tama, sistem ini memiliki sembilan modul utama dengan hak akses berjenjang sesuai peran pengguna (Admin, Asesor, Koordinator, Juru Parkir, dan Masyarakat), sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Modul Utama Aplikasi SIMPAS

Modul	Pengguna Utama	Fungsi Utama
Dashboard	Semua Role	Statistik ringkasan data parkir, status tagihan, keluhan
User & Role	Admin	Manajemen akun pengguna, identitas, dan permission
Area/Sub Area/Titik	Admin, Koordinator	Wilayah operasional dan titik parkir aktif/nonaktif
Juru Parkir	Admin, Koordinator	Data juru parkir resmi, relasi titik, profil publik
Kontrak/Tagihan	Admin, Asesor	Kontrak periodik, tagihan bulanan, status <i>PENDING/PAID</i>
Setoran	Internal	Pencatatan setoran, upload bukti, validasi reviewer
Keluhan	Publik, Admin, Asesor	Pengaduan masyarakat (<i>PENDING/PROCESSING/RESOLVED/REJECTED</i>)

Modul	Pengguna Utama	Fungsi Utama
Zonasi	Admin	Tarif parkir berdasarkan kategori lokasi (Zona A/B/C)
Surat Teguran	Admin, Asesor	Penerbitan SP1–SP3 bagi petugas yang melanggar

Sumber: Blueprint Aplikasi SIMPAS Dishub Banyumas

Telaah dokumen *blueprint* menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana awal pengembangan dengan kondisi implementasi saat penelitian dilakukan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan Blueprint dengan Implementasi SIMPAS

Fitur	Rencana (Blueprint)	Realisasi
<i>Payment gateway</i>	Integrasi sistem pembayaran daerah	Belum terimplementasi; tagihan masih dicatat manual
QR Code KTA juru parkir	Verifikasi identitas petugas oleh masyarakat	Sebagian terimplementasi, penggunaan masih terbatas
Notifikasi otomatis	Pengingat tagihan dan status keluhan	Belum tersedia; komunikasi masih manual
Mobile app/PWA petugas	Akses SIMPAS via ponsel petugas lapangan	Belum tersedia; sistem hanya berbasis web
Dashboard analitik zonasi	Evaluasi kinerja wilayah dan setoran	Tersedia namun terbatas; analitik belum optimal

Sumber: Blueprint dan Aplikasi SIMPAS

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa proses pengembangan SIMPAS masih berada pada tahap transisi dan penyempurnaan, dipengaruhi tidak hanya oleh proses pengembangan teknis yang belum selesai, tetapi juga oleh kendala kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk belum optimalnya transfer pengetahuan kepada pegawai internal Dinas Perhubungan.

1. Aspek Perencanaan (*Planning*)

SIMPAS dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan retribusi parkir daerah, mencakup digitalisasi pencatatan data parkir, peningkatan penerimaan retribusi melalui kontrak dan setoran digital, penyediaan kanal pengaduan publik, serta verifikasi identitas juru parkir resmi.

"Tujuan utamanya, yang pertama ini memberikan informasi terhadap masyarakat di mana titik resmi dan juru parkir resminya... Jadi, sekaligus sebagai bahan sosialisasi tentang perparkiran di Banyumas" (Informan 1, Ketua Divisi Perparkiran Dishub Banyumas)

Data penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah penerapan SIMPAS disajikan pada Tabel 3 sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan tersebut.

Tabel 3: Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 (s.d. Juni)

Periode	Kategori	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)
Tahun 2024	Sebelum SIMPAS	1.330.940.000
Januari–Juli 2025	Sebelum SIMPAS	826.900.000
Total Sebelum SIMPAS	2024–Juli 2025	2.157.840.000

Periode	Kategori	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)
Agustus–Desember 2025	Sesudah SIMPAS	1.111.285.000
Januari–Juni 2026	Sesudah SIMPAS	1.411.140.000
Total Sesudah SIMPAS	Agustus 2025–Juni 2026	2.522.425.000

Sumber: Data Retribusi Parkir 2024–2026, Dishub Banyumas

Total realisasi retribusi parkir pada periode sesudah implementasi SIMPAS mencapai Rp2.522.425.000, dibandingkan Rp2.157.840.000 pada periode sebelumnya, atau terdapat selisih peningkatan sebesar Rp364.585.000. Peningkatan ini tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada SIMPAS, karena turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti bertambahnya titik parkir, peningkatan aktivitas ekonomi, serta intensitas pengawasan. Meskipun demikian, keberadaan SIMPAS berpotensi mendukung pengelolaan data perparkiran yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dibandingkan sistem manual sebelumnya, sehingga peningkatan realisasi retribusi dapat dipandang sebagai indikasi positif yang memerlukan penelitian kuantitatif lanjutan untuk mengukur besarnya pengaruh sistem tersebut.

Strategi pengelolaan dan pengembangan SIMPAS disusun dalam kerangka kerja sama antara Dishub Banyumas dan PT Krisna Ardhi Tama melalui empat tahap: pembangunan infrastruktur data master, pengembangan modul keuangan, pengembangan layanan publik, serta integrasi pembayaran digital dan fitur analitik lanjutan. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa tahap integrasi *payment gateway*, notifikasi otomatis, dan aplikasi mobile belum terealisasi. Temuan penting lainnya adalah kurangnya strategi sosialisasi yang terstruktur—setelah lebih dari enam bulan beroperasi, mayoritas juru parkir dan masyarakat masih belum mengetahui keberadaan dan fungsi SIMPAS. Fenomena ini sejalan dengan kerangka *Diffusion of Innovations* (Rogers, 1962), yang menegaskan bahwa keberhasilan adopsi inovasi tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi, tetapi juga pada efektivitas saluran komunikasi yang menjembatani inovator dengan calon pengguna. Kondisi ini konsisten dengan temuan penelitian implementasi sistem parkir digital di Indonesia yang mengidentifikasi lemahnya sosialisasi sebagai faktor penghambat utama adopsi sistem (Nugraha et al., 2025).

Prosedur kerja penggunaan SIMPAS mengikuti alur operasional dalam dokumen Product Knowledge, mulai dari pendataan area dan titik parkir, pendataan petugas, pengelolaan kontrak dan tagihan, pencatatan setoran, hingga penanganan keluhan. Namun, prosedur tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan prosedur untuk kondisi khusus seperti gangguan sistem (*downtime*) belum ditetapkan secara resmi, sehingga tidak tersedia mekanisme pengganti yang jelas bagi masyarakat maupun petugas.

2. Aspek Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengelolaan SIMPAS secara formal berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, melibatkan Dishub sebagai pemilik sistem dan PT Krisna Ardhi Tama sebagai penyedia sekaligus pemelihara teknis, dengan koordinator parkir sebagai penghubung di tingkat lapangan. Struktur pengguna sistem terdiri atas lima level akses (Admin, Asesor, Koordinator, Juru Parkir, dan Masyarakat) dengan cakupan menu yang berbeda sesuai tugas masing-masing.

Penelitian ini menemukan bahwa struktur organisasi pengelola SIMPAS belum sepenuhnya terformalisasi dalam dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini berkaitan dengan konsep formalisasi organisasi (Robbins, 2003), yang menegaskan bahwa rendahnya formalisasi akan mengakibatkan ketidakjelasan peran, inkonsistensi pelaksanaan tugas, dan lemahnya akuntabilitas antarunit. Dari perspektif *good governance*, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang mensyaratkan landasan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang

jas dalam penyelenggaraan layanan publik (UNDP, 1997), terutama terkait siapa yang akan mengelola SIMPAS secara penuh setelah masa kontrak dengan PT Krisna Ardhi Tama berakhir.

Pembagian tugas operasional menempatkan Dishub bertanggung jawab atas kebijakan operasional, pengawasan kinerja, dan penanganan keluhan, sementara PT Krisna Ardhi Tama menangani pemeliharaan teknis, perbaikan bug, dan pengembangan fitur. Di tingkat lapangan, koordinator mengelola titik parkir dan memastikan kepatuhan setoran juru parkir. SIMPAS telah menyediakan fitur Surat Teguran (SP1–SP3) sebagai mekanisme sanksi, namun penerapannya di lapangan belum dijalankan.

3. Aspek Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari sisi internal, SIMPAS digunakan oleh admin dan asesor Dishub untuk memantau data titik parkir dan menindaklanjuti keluhan, namun pemanfaatan oleh juru parkir di lapangan masih sangat rendah. KTA berbarcode telah didistribusikan, tetapi proses verifikasi melalui QR Code dianggap kurang praktis untuk transaksi parkir yang berlangsung cepat, terutama dengan kendala ketidakstabilan akses internet di sejumlah titik. Hambatan ini berkaitan dengan kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih nyata, khususnya pada kelompok lansia dan masyarakat berpendidikan rendah, sejalan dengan temuan penelitian implementasi *e-parking* di Indonesia yang menunjukkan rendahnya literasi digital sebagai penghambat utama (Nugraha et al., 2025).

Dari sisi masyarakat, setelah lebih dari enam bulan beroperasi, sebagian besar pengguna lahan parkir di Purwokerto mengaku tidak mengetahui keberadaan SIMPAS, menunjukkan bahwa sosialisasi publik belum berjalan efektif.

"Belum pernah, karena baru tahu sekarang. Belum ada pengalaman langsung. Tapi mungkin, kendala yang muncul itu kalau kuota internet habis atau sinyal lemah. Harusnya lebih mudah, apalagi buat orang yang sehari-harinya pegang HP" (Informan 11, masyarakat umum)

Sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir dan koordinator dilakukan melalui pertemuan yang diinisiasi Dishub, namun bersifat *top-down* dan tidak terstruktur sehingga informasi tidak tersebar merata. Banyak juru parkir tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai cara menggunakan fitur SIMPAS, dan belum tersedia modul pelatihan tertulis.

"Pokoknya tujuannya cuma KTA baru gitu aja... Memang dari koordinator itu hanya menyuluhkan tentang KTA baru, tidak menyuluhkan tentang ini untuk apa, ini disuruh apa" (Informan 8, Juru Parkir kawasan alun-alun)

Komunikasi internal antara Dishub dan PT Krisna Ardhi Tama umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung dan grup WhatsApp, tanpa sistem tiket atau platform manajemen insiden formal. Komunikasi dengan koordinator di lapangan juga masih informal, mencerminkan persoalan klasik hubungan *principal-agent*, di mana Dishub sebagai *principal* mengandalkan koordinator sebagai *agent* tanpa mekanisme pelaporan terstruktur, sehingga membuka ruang *information asymmetry*. Kondisi ini sejalan dengan temuan implementasi sistem parkir digital di berbagai daerah yang mengidentifikasi lemahnya koordinasi antarunit sebagai penghambat efektivitas operasional (Nugraha et al., 2025).

4. Aspek Pengendalian (*Controlling*)

Penilaian kinerja pengelolaan SIMPAS dapat ditinjau dari tingkat penerimaan retribusi, jumlah titik parkir aktif, jumlah dan tingkat penyelesaian keluhan, serta tingkat kepatuhan setoran. Modul pengaduan menyediakan empat status penanganan (*PENDING*, *PROCESSING*, *RESOLVED*, *REJECTED*) yang telah dimanfaatkan masyarakat berdasarkan observasi lapangan.

Pemantauan dilakukan secara internal oleh Dishub melalui dashboard administrator yang menampilkan statistik titik aktif, status tagihan, dan rekap keluhan. Namun, keterbatasan fitur analitik—terutama ketiadaan laporan kinerja berbasis waktu dan peringatan otomatis untuk penyimpangan data—membatasi efektivitas pemantauan. Tidak tersedia pula mekanisme absensi digital atau pelacakan aktivitas harian petugas, sehingga pengawasan lapangan masih bergantung pada inspeksi fisik manual oleh

koordinator atau petugas Dishub. Terkait keberlanjutan sistem, belum terdapat prosedur baku untuk mekanisme layanan alternatif ketika SIMPAS mengalami gangguan teknis (*downtime*), yang berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna terhadap keandalan sistem.

Secara keseluruhan, SIMPAS memiliki potensi besar sebagai alat tata kelola parkir yang transparan dan akuntabel, dengan infrastruktur digital yang memadai sebagai fondasi sistem manajemen parkir modern. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud karena hambatan pada aspek sosialisasi, pembinaan, dan kelengkapan fitur. SIMPAS dapat diterapkan secara berkelanjutan di Banyumas dengan prasyarat: strategi sosialisasi yang masif dan terstruktur; formalisasi struktur pengelola melalui SK dan SOP; pemenuhan fitur dalam *blueprint* yang belum terealisasi; mekanisme sanksi yang konsisten; serta prosedur penanganan darurat saat sistem terganggu. Dalam jangka panjang, keberhasilan SIMPAS sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia internal Dishub, mengingat ketergantungan penuh pada pihak ketiga tanpa transfer pengetahuan dapat menimbulkan risiko keberlangsungan sistem. Temuan ini sejalan dengan penelitian Calcabilla dan Dyastari (2023) pada sistem *e-parking* di Kota Samarinda, serta Rahmawati et al. (2023) pada *e-parking* di Kota Semarang, yang sama-sama menemukan bahwa ketergantungan pada vendor eksternal tanpa penguatan kapasitas internal menjadi hambatan struktural yang berulang dalam transformasi digital layanan publik di tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Pengelolaan SIMPAS oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menunjukkan upaya transformasi digital dalam tata kelola perpustakaan yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Pada aspek perencanaan, tujuan penerapan SIMPAS telah dirumuskan dengan jelas dan diikuti peningkatan realisasi retribusi parkir, meskipun strategi pengembangan dan sosialisasi belum berjalan optimal karena sejumlah fitur dalam *blueprint* belum terealisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat serta juru parkir. Pada aspek pengorganisasian, pembagian peran antaraktor telah ada, namun belum didukung regulasi internal berupa SK maupun SOP yang menjamin kepastian pengelolaan jangka panjang. Pada aspek pelaksanaan, penggunaan SIMPAS telah berjalan pada level administrasi, tetapi pemanfaatan oleh juru parkir dan masyarakat masih rendah akibat sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, dan kendala teknis. Pada aspek pengendalian, pemantauan telah dilakukan melalui dashboard dan kanal pengaduan, namun belum optimal karena keterbatasan fitur analitik dan belum tersedianya prosedur baku penanganan gangguan sistem. Secara keseluruhan, SIMPAS memiliki potensi besar untuk mendukung tata kelola parkir yang lebih baik di Kabupaten Banyumas, tetapi efektivitas implementasinya memerlukan penguatan kelembagaan melalui formalisasi SK dan SOP, percepatan pengembangan fitur, program transfer pengetahuan kepada sumber daya manusia internal, mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih tegas, serta strategi sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan juru parkir. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mengukur secara lebih pasti kontribusi SIMPAS terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan parkir berbasis digital.

REFERENSI

- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan paradigma administrasi publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Angi, I. B. N., & Irfiani, E. (2024). Pengaruh efektivitas sistem elektronik parkir (E-Parking) dalam pengelolaan parkir pada PT. Link Parking Mandiri. *Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31294/jinsan.v4i1.3219>
- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi program E-Parking di kawasan parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, 7(3), 1–8.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Inklusif. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Basri, H., & Ashwad, H. (2021). Pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 18(1), 91–103.
- Calcabilla, C., & Dyastari, L. (2023). Efektivitas penerapan parkir elektronik (E-Parking) dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 9–17.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Desak, P. M. A., Gusti, A. K. R. S. D., & Julianto, P. (2019). Analisis efektivitas penggunaan sistem E-Parking dalam pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3).
- Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. (2024). Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS).
<https://simpas.banyumaskab.go.id/>
- Ekaryn, H. H., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Manajemen parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 62–82.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34287>
- Hamdhana, D., & Iqbal, M. (n.d.). Aplikasi quick count pilkada dengan menggunakan metode random.
- Lubis, E. F., Sundari, R., & Rahmi, Z. P. (2024). Implementasi kebijakan retribusi parkir badan jalan di Kota Pekanbaru. 13(2), 193–201.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurachman, M. (2023). Analisis kebijakan retribusi parkir berlangganan periode 2021–2022 (Studi empiris Kabupaten Sumedang). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, 97–104.
- Publik, J. A. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital (Public Service Innovation Transformation towards Digital Government). 17(c), 54–70.
<https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Putri, C., Alzena, W., Marom, A., Nurcahyanto, H., & Soedarto, J. (2023). Implementasi program parkir elektronik (E-Parking) dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang (Studi kasus di Jalan Depok). *FISIP UNDIP*, 1–13.
- Rahmawati, A. A., Widowati, N., Publik, D. A., & Semarang, K. (2024). Efektivitas program E-Parking dalam mewujudkan smart city di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47550/32235>
- Radar Banyumas. (2025, 23 Desember). Barcode parkir Banyumas dibuka ke publik (hlm. 1, 11).
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. Free Press.
- Romasi, I., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas penggunaan sistem parkir elektronik (E-Parking) dalam mewujudkan smart city di Kota Medan. 19(2), 276–297.
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. 4(2), 40–46.
- Sartika, D., Kriswardhana, W., & Suyoso, H. (2020). Evaluasi dan manajemen parkir kawasan Tanrise City Jember. *Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun*, 6(1), 22.
<https://doi.org/10.33506/rb.v6i1.1011>
- Siahaan, M. P. (2011). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Walo, J., Yanuarko, A., Asrori, A., Apriani, T., Riva, A., Amin Faruk, M. S. U. L., Palupi, S. P., Sari, N. R., & Kusumaningrum, D. A. (2021). Inovasi digitalisasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi bentuk lainnya pada daerah terinovatif. Bina Praja Press.
- Wicaksana, B. S., Wibowo, K., & Soedarsono, S. (2024). Analisis kebutuhan dan ketersediaan ruang parkir pada pusat perbelanjaan: Studi kasus Rita Pasaraya Supermall Purwokerto. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14895–14909.
- Widnyani, I. G. A. A. (2017). Pergeseran paradigma administrasi publik dalam pelayanan publik. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 93–102.
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan efisiensi pelayanan publik ditinjau dari perspektif administrasi publik. 1(3), 103–110.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

385

Indexed

